

**TELAH DIREVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026**

Kami telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 ini.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Jenderal



Suganda Pandapotan Pasaribu

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Esti Budiarti
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

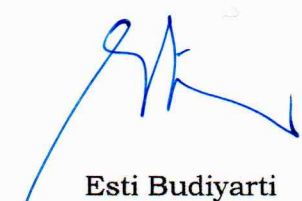
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO HUKUM,
KERJA SAMA, DAN ORGANISASI,


Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001


Esti Budiarti
NIP. 197009161994032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Jumlah kesepakatan kerja sama yang difasilitasi	1 Kesepakatan
	Jumlah produk hukum yang difasilitasi	1 Dokumen
	Jumlah dokumen penataan organisasi	1 Dokumen
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	
Output 1: Kerja Sama Kelembagaan	Rp 5.527.000
Output 2: Layanan Hukum	Rp 5.891.000
Output 3: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp 6.300.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp 335.990.000
Total	Rp 353.708.000

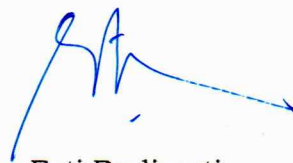
Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO HUKUM,
KERJA SAMA, DAN ORGANISASI,



Esti Budiarti
NIP. 197009161994032003



DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Jumlah kesepakatan kerja sama yang difasilitasi	1 Kesepakatan	Merupakan hasil kegiatan kerja sama berupa kesepakatan kerja sama dalam negeri (kerja sama antar instansi/lembaga dan magang); serta kesepakatan kerja sama luar negeri dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Ombudsman RI terkait koordinasi dan implementasi kerja sama dalam dan luar negeri secara lancar, tepat dan efektif;	Biro HKO	Berdasarkan jumlah kesepakatan kerja sama yang difasilitasi
	Jumlah produk hukum yang difasilitasi	1 Dokumen	Merupakan hasil produk hukum berupa: 1. Rancangan PO (Opini P4 dan JDIH); 2. Rancangan Perubahan UU 37/2008; 3. Rancangan Perubahan PP 64/2012; 4. Laporan Penyelesaian Telaahan Hukum; 5. Laporan Kegiatan Advokasi; dan 6. Laporan Pengelolaan JDIH	Biro HKO	Berdasarkan jumlah produk hukum yang difasilitasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			Hasil produk hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan produk hukum atau efektifitas peraturan perundang-undangan terkait Ombudsman RI		
	Jumlah dokumen penataan organisasi	1 Dokumen	Merupakan hasil kegiatan penataan organisasi, yang terdiri atas: a) Penataan jabatan; b) Evaluasi kelembagaan; c) Penyusunan Roadmap RB; d) Penyusunan Renaksi RB; e) Monev Pelaksanaan RB; f) Pengelolaan website RB; dan g) Penyusunan peta proses bisnis. Hasil kegiatan berguna dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Ombudsman dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik.	Biro HKO	Berdasarkan jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan	Merupakan layanan atas komponen yang melekat pada Layanan Perkantoran biro yang merupakan dukungan Operasional Kantor	Biro HKO	Berdasarkan jumlah layanan pengelolaan operasional yang diberikan selama 1 tahun